

Katalog : 4301002.3307

STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOSOBO**

STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN WONOSOBO 2018



<http://wonosobopps.go.id>

STATISTIK PENDIDIKAN

KABUPATEN WONOSOBO 2018

ISSN : -
No. Publikasi : 33070.1923
Katalog : 4301002.3307
Ukuran Buku : 17,5 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xiv + 50 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Diterbitkan oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo

Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wonosobo 2018 merupakan salah satu topik penyajian hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo.

Publikasi ini menyajikan informasi mengenai kondisi dan perkembangan pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Data yang disajikan mencakup beberapa aspek kegiatan pendidikan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sehingga publikasi ini dapat disajikan, disampaikan ucapan terima kasih. Saran yang membangun dan masukannya untuk perbaikan publikasi serupa di masa datang sangat diharapkan. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Wonosobo, Desember 2019

Kepala Badan pusat Statistik
Kabupaten Wonosobo

Wazirrudin

GAMBARAN UMUM

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa. Seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ..."

Kurangnya pemerataan pendidikan, kurangnya kualitas pendidikan, kurangnya relevansi pendidikan, dan kurangnya efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan merupakan beberapa hal yang bisa menjadi faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Internet yang merupakan salah satu media terbesar di dunia bisa digunakan sebagai pendorong majunya pendidikan masa depan. Namun, ternyata lebih banyak siswa yang belum mengakses internet dibandingkan dengan yang sudah mengakses internet baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Meskipun demikian, persentase siswa yang sudah mengakses internet di daerah perkotaan lebih banyak daripada daerah perdesaan. Sebagian besar siswa SM/MA lebih banyak yang mengakses internet dibandingkan dengan siswa yang duduk di jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs. Sebagian besar siswa lebih banyak yang mengakses internet dengan menggunakan HP/Ponsel dibandingkan dengan menggunakan Komputer, Laptop/Desktop/Tablet, maupun lainnya.

Susenas juga mencatat biaya pendidikan, yaitu keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh penduduk yang masih bersekolah untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan. Jenis pengeluaran pendidikan terbesar yang dikeluarkan oleh rumah tangga baik di daerah perkotaan maupun perdesaan berupa uang sekolah (SPP) dan iuran BP3/POMG.

Tingkat pendidikan suatu masyarakat yang diwakili pendidikan KRT ternyata mempengaruhi partisipasi anak yang mengikuti PAUD. Hal ini ditunjukkan dengan lebih banyaknya anak di daerah perkotaan yang sedang/pernah mengikuti pendidikan pra sekolah dibandingkan dengan di daerah perdesaan.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat adalah dengan adanya program pendidikan gratis pada tingkat dasar. Namun pada kenyataannya, program yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut belum sepenuhnya

dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Hal ini terlihat dari masih adanya penduduk usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak pernah sekolah.

Secara umum Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk yang tinggal di daerah perkotaan lebih tinggi dari penduduk yang tinggal di daerah perdesaan.

Tidak jauh berbeda dengan nilai APS, persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) di daerah perkotaan ternyata juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada APK di daerah perdesaan, kecuali pada jenjang SD/MI dan SMP/MTS. Kesenjangan APK tersebut semakin besar seiring meningkatnya jenjang pendidikan.

Sama halnya dengan pola yang terjadi pada APS dan APK, kesenjangan APM antara perkotaan dan perdesaan semakin terlihat pada jenjang PT. Sementara pada jenjang pendidikan SD/MI, APM tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan.

Perbedaan nilai APS, APK, dan APM antara daerah perkotaan dan perdesaan ini menggambarkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan di Kabupaten Wonosobo ternyata belum merata. Kesempatan penduduk di daerah perkotaan untuk menikmati pendidikan lebih besar daripada penduduk yang di daerah perdesaan.

Hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat antara lain melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Perkembangan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2015–2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam melakukan program pemberantasan buta aksara memberikan hasil yang positif.

Seiring dengan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Wonosobo sudah mencapai 6,51 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Jawa Tengah sudah mengenyam pendidikan sampai dengan Kelas 1 SMP. Hal ini diperkuat dengan banyaknya persentase penduduk usia 15 tahun ke atas di Wonosobo yang hanya menamatkan pendidikan tertingginya sampai dengan jenjang SD/MI.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
GAMBARAN UMUM	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	xiii
INFOGRAFIS	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Sistematika Penyajian	5
BAB II METODOLOGI	7
2.1 Sumber Data	7
2.2 Ruang Lingkup	7
2.3 Kerangka Sampel	8
2.4 Pemilihan Sampel	8
2.5 Keterwakilan Sampel	9
2.6 Konsep dan Definisi	10
2.7 Keterbatasan Data	13
2.8 Metode Analisis	14
BAB III PENUNJANG PENDIDIKAN	15
3.1 Penggunaan Internet	15
3.2 Biaya Pendidikan	17
BAB IV PARTISIPASI PENDIDIKAN	19
4.1 Pendidikan Anak usia Dini	20
4.2 Partisipasi Sekolah	24
4.3 Angka Partisipasi Sekolah	27
4.4 Angka Partisipasi Kasar	29
4.5 Angka Partisipasi Murni	32
BAB V PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	37
5.1 Angka Melek Huruf	37
5.2 Rata-rata Lama Sekolah	41
5.2 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	42

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Biaya Pendidikan menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2018 (Rupiah)....	18
Tabel 4.1	Persentase Anak Usia 0 - 6 Tahun yang Pernah/ Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2018.....	23
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Tipe Daerah dan Partisipasi Sekolah, 2018.....	25
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah, dan Partisipasi Sekolah, 2018.....	26
Tabel 4.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2018.....	29
Tabel 4.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan, 2018.....	32
Tabel 4.6	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2018.....	34
Tabel 5.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2018.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Persentase Siswa Usia 10 tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, 2018.....	16
Gambar 4.1	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur, 2018.....	21
Gambar 4.2	Persentase Anak Berusia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pra Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2018.....	22
Gambar 4.3	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur, 2015-2018.....	28
Gambar 4.4	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, 2016, 2017, dan 2018.....	31
Gambar 4.5	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan, 2016, 2017, dan 2018.....	33
Gambar 5.1	Perkembangan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur, 2014-2018.....	40
Gambar 5.2	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, 2015-2018.....	42
Gambar 5.3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018.....	43
Gambar 5.4	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018.....	44
Gambar 5.5	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018.....	45

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

- Lampiran 1. Presentase Penduduk menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo (ribuan), 2018..... 49
- Lampiran 2. Presentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah di Kabupaten Wonosobo (ribuan), 2018..... 50

<https://wonosobokab.bps.go.id>

STATISTIK PENDIDIKAN

Kabupaten Wonosobo **2018**

1.10 %

Persentase Penduduk usia 7-12 tahun yang tidak sekolah lagi di daerah pedesaan

7.38 %

Persentase Penduduk usia 13-15 tahun yang tidak sekolah lagi di daerah perkotaan



37,1 %

Partisipasi pra sekolah pada kelompok umur 0-6 tahun

Angka Melek Huruf (AMH) menurut kelompok umur 15 tahun ke atas sebanyak 94,20 %

Angka Melek Huruf (AMH) menurut kelompok umur 25-44 tahun sebanyak 99,02 %

Angka Melek Huruf (AMH) menurut kelompok umur 45 tahun ke atas sebanyak 86,87 %

APM

Menurut jenjang Pendidikan



97,65 %
SD/MI



72,18 %
SMP/MTS



44,71 %
SMA/MA



8,49 %
DI-S3



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Begitu pentingnya pendidikan dalam perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menuangkannya dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV“...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ...”

Selain memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi, pendidikan juga menetaskan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, serta dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Kegagalan dalam membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial, seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan *welfare dependency* yang menjadi Pembangunan memberi kontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi, menetaskan sumber daya manusia yang berkualitas, dan menimbulkan iklim bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. beban sosial politik bagi pemerintah. Permasalahan pendidikan yang masih dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini antara lain adalah kurangnya pemerataan pendidikan, kurangnya kualitas pendidikan, kurangnya relevansi pendidikan, dan kurangnya efisiensi dan efektivitas manajemen pendidikan.

Untuk mengatasi berbagai kekurangan dalam dunia pendidikan, pemerintah pun mengupayakan berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju.

Untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, Negara menyelenggarakan program wajib belajar untuk pendidikan dasar. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Salah satu langkah pemerintah untuk mensinergikan program-program pendidikan agar tepat sasaran antara lain dengan adanya program Pendidikan Untuk Semua (PUS). Sasaran program Pendidikan Untuk Semua antara lain adalah Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pemberantasan Buta Aksara, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan Peningkatan Mutu Pendidikan.

Untuk mengukur dan menentukan arah kebijakan pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, saat ini, tidak hanya pemerintah di level pusat saja tetapi juga pemerintah daerah sudah semakin membutuhkan data yang terkait dengan pendidikan seperti angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, angka melek huruf, dll. Indikator-indikator tersebut merupakan ukuran-ukuran kuantitatif yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan pendidikan. Konsekuensi dari globalisasi teknologi informasi yang semakin terbuka dan serba cepat adalah semakin tingginya tuntutan terhadap kualitas data. Untuk itu BPS Kabupaten Wonosobo telah melakukan upaya untuk dapat menyajikan data yang semakin akurat dan aktual.

1.2 Tujuan

Maksud dan tujuan utama penyajian publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wonosobo adalah untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Wonosobo pada tingkat kabupaten. Kondisi dan perkembangan pendidikan dalam publikasi ini akan dilihat dari tiga aspek yaitu : sarana dan prasarana pendidikan, partisipasi sekolah, dan hasil pembangunan pendidikan.

Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan data dan informasi dunia pendidikan yang sangat bermanfaat sebagai bahan pencerahan, monitor dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan. Dalam jangka pendek, informasi yang disajikan dalam publikasi ini diharapkan dapat pula digunakan sebagai evaluasi penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sesuai dengan target yang tertuang dalam UUD Tahun 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1.3 Sistematika Penyajian

Bagian awal publikasi ini menyajikan abstraksi untuk memberikan gambaran ringkas dan menyeluruh kepada pembaca atas keseluruhan kandungan publikasi. Pembahasan utama dirinci ke dalam lima bab sesuai tema statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penyajian.

Bab 2 menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang mencakup sumber data, keterwakilan sampel, konsep dan definisi, keterbatasan data, serta metode analisis.

Bab 3 menyajikan pembahasan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang mencakup informasi umum tentang penggunaan internet, biaya pendidikan dan beasiswa/bantuan pendidikan.

Bab 4 tentang partisipasi pendidikan yang meliputi pendidikan anak usia dini, partisipasi sekolah, serta pendidikan kesetaraan.

Bab 5 membahas tentang hasil-hasil pembangunan pendidikan yang antara lain dicerminkan oleh angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan putus sekolah.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018. Jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data Kor Susenas Tahun 2018, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai pendidikan seperti sarana prasarana pendidikan, partisipasi pendidikan, dan hasil pembangunan pendidikan.
- b. Data Konsumsi Pengeluaran Tahun 2018, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai konsumsi rumah tangga terkait dengan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. BPS melaksanakan Susenas sejak tahun 1963. Dalam dua dekade terakhir, sampai dengan tahun 2010, pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Konsumsi dan Pengeluaran, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. Pada tahun 2011 terjadi perubahan, pengumpulan data konsumsi dan pengeluaran dilakukan secara triwulanan (triwulan I-IV) yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember bersamaan dengan Kor. Susenas Triwulanan dilaksanakan pada tahun 2011- 2014. Mulai tahun 2015, pelaksanaan Susenas dilaksanakan 2 (dua) kali setahun, yaitu bulan Maret dan September.

2.2 Ruang Lingkup

Pelaksanaan Susenas Maret 2018 mencakup 800 rumah tangga sampel yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Wonosobo. Pencacahan

bulan Maret dengan jumlah sampel besar menghasilkan estimasi sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.

Sedangkan pencacahan Susenas pada bulan September dengan sampel kecil hanya bisa digunakan untuk estimasi tingkat provinsi/nasional. Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Wonosobo 2018 menampilkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2017 - 2018.

2.3 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap pertama, penarikan tahap kedua dan kerangka sampel untuk penarikan sampel tahap ketiga.

- ✓ Kerangka sampel pemilihan tahap pertama adalah daftar blok sensus biasa SP2010.
- ✓ Kerangka sampel pemilihan tahap kedua adalah daftar 25 persen blok sensus SP2010 yang sudah ada kode stratanya.
- ✓ Kerangka sampel pemilihan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil pemutakhiran di setiap blok sensus terpilih.

2.4 Pemilihan Sampel

Metode *sampling* yang digunakan yaitu penarikan tiga tahap berstrata. Tahapan dari metode ini diuraikan sebagai berikut :

- ✓ Tahap pertama, memilih 25 persen blok sensus populasi secara *pps* (*Probability Proportional to Size*) dengan size jumlah rumah tangga hasil SP2010 di setiap strata.
- ✓ Tahap kedua, memilih sejumlah n blok sensus sesuai alokasi secara *systematic* di setiap strata *urban/rural* per kabupaten/kota per strata kesejahteraan.
- ✓ Tahap ketiga, memilih 10 rumah tangga hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT. Pemilihan sampel rumah tangga di beberapa lokasi menggunakan program komputer yang telah disiapkan dari BPS Pusat setelah hasil pemutakhiran di entri.

Pengumpulan data di setiap rumah tangga terpilih dilakukan wawancara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Keterangan individu dikumpulkan melalui wawancara dengan individu yang bersangkutan, sedangkan keterangan tentang rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui karakteristik yang ditanyakan.

2.5 Keterwakilan Sampel

Keterwakilan sampel dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu banyaknya sampel, kesalahan *sampling* (*sampling error*), dan kesalahan *non sampling* atau *human errors* (*non sampling error*). Keterwakilan sampel ini mempengaruhi estimasi hasil pendataan.

(1) Banyaknya sampel

Semakin banyak atau semakin besar jumlah sampel dalam suatu survei, maka estimasi yang dihasilkan akan semakin mendekati karakteristik populasinya.

(2) Kesalahan *non sampling* (*Non Sampling Error*)

Non sampling error merupakan kesalahan yang muncul pada saat pelaksanaan survei dan atau saat pengolahan data. Contoh dalam pelaksanaan survei :

- (i) Penggunaan konsep dan definisi yang salah oleh petugas akibat kesalahan Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara petugas pencacah dengan responden (rumah tangga terpilih). penyampaian dari instruktur ke petugas pencacah maupun pengawas;
- (ii) Tidak ditemukannya rumah tangga sampel;
- (iii) Kesalahan pengertian antara responden dan petugas pencacah pada saat wawancara.

Sedangkan kesalahan pada saat pengolahan :

- (i) Kesalahan pada saat perekaman data (*entry data*);
- (ii) Kesalahan *editing* dan *coding*.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pendataan yang bertujuan untuk memperkecil jenis kesalahan ini, namun kesalahan *non sampling* tidak dapat dihilangkan sama sekali serta sulit untuk dievaluasi secara statistik.

(3) Kesalahan *sampling* (*Sampling Error*)

Sampling error merupakan kesalahan yang muncul akibat dari penggunaan teknik *sampling* dalam suatu survei. Estimasi yang dihasilkan dalam survei tidak terlepas dari *sampling variability*. Secara statistik, besarnya *sampling error* dapat ditunjukkan oleh besarnya angka galat baku (*standard error/SE*). Untuk mengukur sejauh mana sampel yang digunakan sudah cukup menggambarkan keadaan parameter populasi digunakan *Relative Standard Error (RSE)*, yaitu hasil bagi SE dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%).

2.6 Konsep dan Definisi

- a) **Tipe Daerah** menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel, yaitu kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.
- b) **Blok Sensus** adalah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS.
- c) **Rumah Tangga Biasa dan Rumah Tangga Khusus**
Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) berjumlah 10 orang atau lebih.

d) **Kepala Rumah Tangga (KRT) dan Anggota Rumah Tangga (ART)**

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

e) **Biaya pendidikan** adalah semua biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan, baik yang sudah dibayarkan maupun yang belum dibayarkan (berupa uang atau barang) untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan responden.

f) **Bantuan Pendidikan** adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang bukan karena prestasi, baik berupa uang atau barang, seperti : Beasiswa Miskin, Bantuan Pendidikan dari PNPM (buku, sepatu, uang transport), beasiswa yang diperoleh karena tugas belajar dan sekolah ikatan dinas. Sumber beasiswa/bantuan pendidikan bisa berasal dari BSM (Bantuan Siswa Miskin; bantuan/beasiswa pemerintah lainnya; lembaga non pemerintah; sekolah maupun perorangan).

g) **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Paket A/B/C).

Pendidikan formal maupun non formal yang dimaksud disini adalah yang berada dibawah pengawasan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemdikbud) maupun kementerian lainnya.

- h) **Pendidikan anak usia dini (PAUD)** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- i) **Tidak/belum pernah sekolah** adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar. **Masih bersekolah** adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C), baik yang berada dibawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta. **Tidak bersekolah lagi** adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.
- j) **Partisipasi Pendidikan**
- Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu.
- Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.
- Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.
- k) **Angka Putus Sekolah (APTs)** adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang putus sekolah pada jenjang

pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Melanjutkan adalah proporsi penduduk pada kelompok umur tertentu yang telah tamat pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu dan melanjutkan bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

- l) **Angka Melek Huruf** adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin, huruf Arab, atau huruf Lainnya.
- m) **Tamat sekolah** adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- n) **Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan** adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.
SD/MI meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
SMP/MTs meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.
SM/MA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat.
PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I/II/III, DIV/S1, S2, S3 dan sederajat.
- o) **Mengakses internet** adalah apabila seseorang meluangkan waktu untuk mengakses internet, sehingga ia dapat memanfaatkan atau menikmati fasilitas internet seperti : mencari literature/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, *e-mail/chatting*, dll.

2.7 Keterbatasan Data

Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan BPS, termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu

rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus, seperti asrama, penjara dan sejenisnya tidak dicakup.

2.8 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif satu atau dua sektor dengan penyajian data dalam bentuk tabel, ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah kabupaten/kota. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai perkembangan pendidikan selama beberapa periode waktu. Pada akhir publikasi ini dilengkapi pula dengan tabel lampiran untuk melihat data pada tingkat kabupaten/kota.

BAB 3

PENUNJANG PENDIDIKAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk menyediakan penunjang pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Mutu pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata. Sarana prasarana merupakan media atau alat material yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung.

Di era digital saat ini, internet merupakan salah satu sarana pendidikan yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Internet dapat digunakan sebagai sumber informasi yang sangat besar dalam dunia pendidikan.

Gambaran faktor internal rumah tangga dalam upaya memperoleh pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara akan dibahas pada bab ini, dimulai dari kemudahan penduduk dalam mengakses pendidikan baik dari aspek penggunaan internet, biaya pendidikan termasuk bantuan pendidikan yang diterima rumah tangga.

3.1 Penggunaan Internet

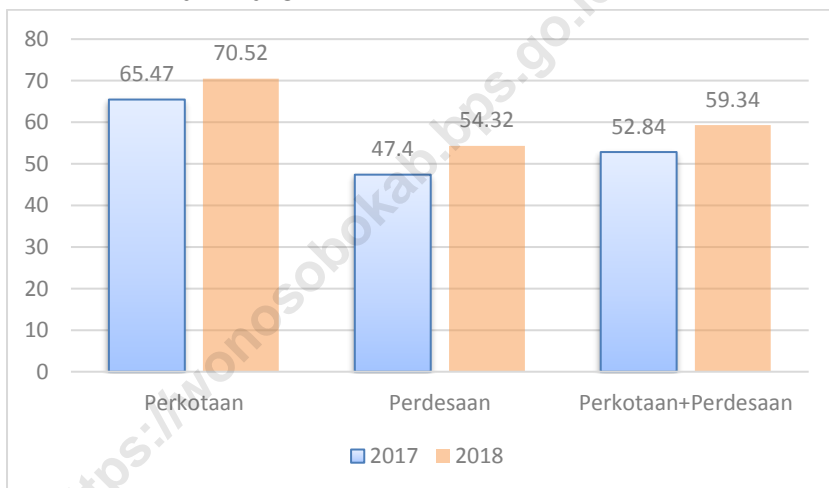
Sebelum adanya Internet, salah satu masalah yang dihadapi oleh pendidikan (di seluruh dunia) adalah akses kepada sumber informasi. Dengan adanya internet, kita bisa mengakses informasi sebanyak-banyaknya, baik informasi berupa artikel, gambar, ataupun video.

Di era modern seperti saat ini, internet sudah menjadi salah satu media yang sangat penting bagi siapapun dalam memperluas wawasannya. Manfaat Internet sekarang sudah dapat dirasakan oleh berbagai kalangan. Manfaat Internet sebagai salah satu media terbesar di dunia bisa digunakan sebagai pendorong majunya pendidikan masa depan.

Kehadiran internet bukanlah pengganti sistem pendidikan melainkan lebih bersifat penambah dan pelengkap.

Selain memberikan manfaat bagi siswa, internet juga dapat memberikan dampak yang buruk. Hal ini dikarenakan internet tidak hanya menyajikan informasi-informasi positif saja, namun juga informasi-informasi yang bersifat negatif. Oleh karena itu penggunaan internet oleh siswa sebaiknya mendapat pengawasan dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya.

Gambar 3.1 Persentase Siswa Usia 10 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet selama Tiga Bulan Terakhir menurut Tipe Daerah, 2017-2018



Sumber: Susenas 2018

Gambar 3.1 menunjukkan informasi tentang persentase siswa usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet selama 3 bulan terakhir berdasarkan hasil Susenas 2018. Menurut tipe daerah, persentase siswa usia 10 tahun ke atas di perkotaan lebih banyak yang mengakses internet (70,52 persen) daripada di perdesaan (54,32 persen). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mengakses internet juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana teknologi yang memberikan kemudahan dalam mengakses internet, misalnya tersedianya warnet, wifi gratis, dan lain-lain.

3.2 Biaya Pendidikan

Dalam UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memenuhi hak warga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*Indirect Cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa, berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*oportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.

Biaya pendidikan yang dicakup dalam Susenas merupakan keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh penduduk yang masih bersekolah untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi:

- (i) biaya pendaftaran, yaitu uang pangkal/gedung/daftar ulang;
- (ii) biaya operasional, terdiri atas uang SPP, komite sekolah, praktikum/keterampilan, iuran OSIS, evaluasi/ujian, bahan penunjang mata pelajaran, seragam sekolah dan olah raga, buku pelajaran/panduan/diktat, lembar kerja siswa, alat tulis dan perlengkapannya, kursus yang diselenggarakan sekolah, dan atau biaya rutin operasional pendidikan lainnya;
- (iii) biaya transportasi dan uang saku.

Tabel 3.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Biaya Pendidikan menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengeluaran Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, 2018 (Rupiah)

Biaya Pendidikan	Tipe daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan +Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sumbangan Pembangunan Sekolah	5.117	1.634	2.624
Uang Sekolah (SPP) dan iuran BP3/POMG	13.478	7.875	9.469
Iuran Sekolah lainnya	1.383	529	772
Buku Pelajaran, fotocopy, buku pelajaran	1.219	686	838
Alat-alat Tulis	849	719	756
Uang Kursus	1.241	331	590
Total	23.287	11.773	15.049

Sumber: Susenas 2018

Dirinci menurut jenis pengeluaran pendidikan, terlihat bahwa pengeluaran pendidikan terbesar berasal dari jenis pengeluaran uang sekolah (SPP) dan iuran BP3/POMG. Biaya pendidikan per kapita untuk jenis pengeluaran ini di daerah perkotaan sebesar Rp. 13.478,- dan di daerah perdesaan Rp. 7.875,-. Sementara total pengeluaran untuk uang sekolah (SPP) dan iuran BP3/POMG sebesar Rp. 9.469,- per kapita per bulan.

Jenis pengeluaran lain yang cukup besar adalah untuk sumbangan pembangunan sekolah, dimana untuk daerah perkotaan sebesar Rp. 5.117,-, untuk daerah perdesaan sebesar Rp. 1.634,- dan untuk daerah perkotaan dan perdesaan sebesar Rp. 2.624,- per kapita per bulan.

BAB 4 PARTISIPASI PENDIDIKAN

April 2000, 164 negara termasuk Indonesia, bersama-sama lembaga-lembaga internasional lainnya mengembangkan kerangka yang menfokuskan untuk mencapai 6 tujuan pendidikan untuk semua, meliputi tujuan untuk mencapai perawatan dan pendidikan anak usia dini, mencapai pendidikan dasar untuk masyarakat, perluasan kesempatan belajar bagi remaja dan orang dewasa, penyebaran keaksaraan, tujuan paritas dan kesetaraan gender, serta peningkatan kualitas pendidikan. Keenam tujuan EFA (*Education For All*) tersebut disepakati supaya tercapai mulai tahun 2005 dan selambat-lambatnya terpenuhi pada tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Keberhasilan pendidikan pada tingkat dasar akan meningkatkan partisipasi pendidikan pada tingkat menengah, dan memperkuat daya saing untuk meningkatkan kualitas hidupnya ketika dewasa.

Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2018 memperlihatkan hasil perhitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

4.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 perkembangan, yaitu : perkembangan moral dan agama, perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), sosio emosional (sikap dan emosi) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini seperti yang tercantum dalam Permendiknas no 58 tahun 2009.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

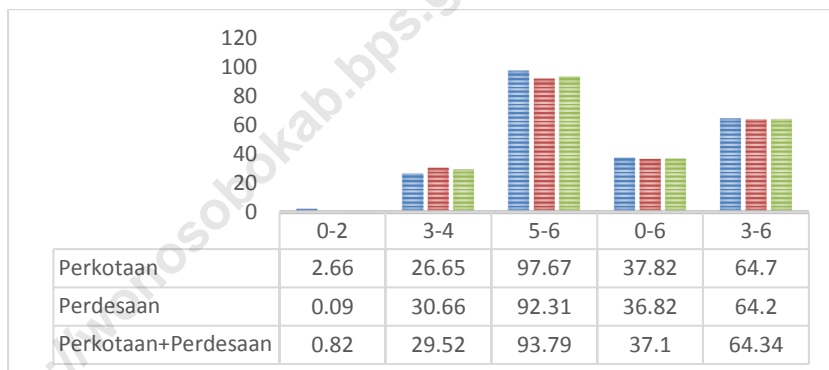
- ✓ Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
- ✓ Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun (masa emas).

Gambar 4.1 memperlihatkan bahwa partisipasi anak yang mengikuti PAUD pada tahun 2018 usia 3-4 tahun sebesar 29,52 persen, usia 5-6 tahun

93,79 persen, dan usia 3-6 tahun sebesar 64,34 persen. Dilihat menurut tipe daerah, tercatat bahwa partisipasi anak dalam mengikuti PAUD di daerah perkotaan lebih besar daripada daerah perdesaan. Hal ini terjadi pada setiap kelompok umur, kecuali kelompok umur 3-4 tahun. Kultur masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan yang lebih baik dan mobilitas tinggi dalam pekerjaan, turut berperan dalam partisipasi anak mengikuti pendidikan pra sekolah. Selain itu, kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan usia dini juga berpengaruh terhadap keputusan untuk mengikutsertakan anak dalam pendidikan pra sekolah.

Gambar 4.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2018



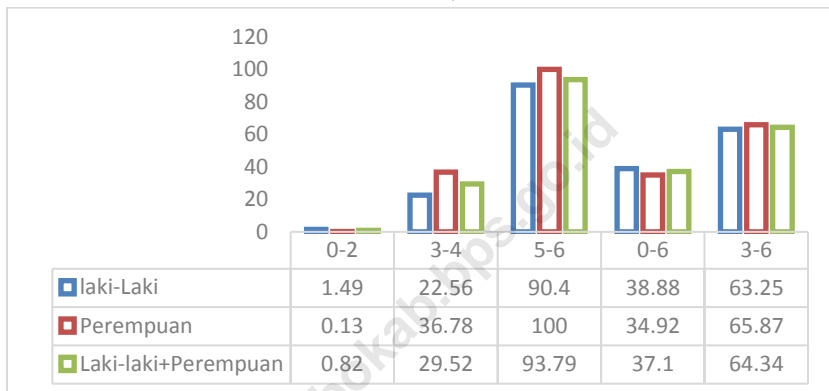
Sumber: Susenas 2018

Persentase anak usia dini yang mengikuti PAUD di daerah perkotaan tercatat sebesar 37,82 persen untuk kelompok umur 0-6 tahun dan 64,7 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun. Sedangkan untuk daerah perdesaan sebesar 36,82 persen untuk kelompok umur 0-6 tahun dan 64,2 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun.

Pada gambar 4.2 memperlihatkan, partisipasi pra sekolah anak laki-laki pada kelompok umur 0-6 tahun (38,8 persen) lebih tinggi daripada perempuan (34,92 persen). Sedangkan pada kelompok umur 3-6 tahun partisipasi anak laki-laki (63,25 persen) lebih rendah dibandingkan anak perempuan (65,87 persen).

Pada kelompok umur 0-2 tahun partisipasi pra sekolah untuk anak laki-laki lebih tinggi (1,49 persen) daripada anak perempuan (0,13 persen). Tapi partisipasi pra sekolah usia 3-4 tahun dan 5-6 tahun untuk anak laki-laki lebih rendah dibanding anak perempuan.

Gambar 4.2 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2018



Sumber: Susenas 2018

Tabel 4.1 di bawah memperlihatkan bahwa persentase tertinggi dari jenis pendidikan PAUD yang diikuti anak usia 0-6 adalah Taman Kanak-Kanak yaitu sebesar 61,99 persen, kemudian PAUD sebesar 21,99 persen, sedangkan yang mengikuti pendidikan pra sekolah di Bustanul Athfal/Raudatul Athfal (BA/RA) sebesar 15,35 persen dan di Kelompok Bermain sebesar 0,67 persen. Peran Pos PAUD di perdesaan dalam program pendidikan pra sekolah lebih baik dari pada di perkotaan. Ketika TK/BA/RA kurang terjangkau oleh masyarakat di perdesaan, maka Pos PAUD Perdesaan yang sejenisnya dapat menyediakan alternatif layanan secara baik. Dari seluruh anak usia 0-6 tahun yang mengikuti pendidikan pra sekolah di perdesaan, sebanyak 23,98 persen memanfaatkan fasilitas PAUD, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAAM, PAUD-PAK, PAUD BIA, TKQ, dan lain-lain, serta 0,93 persen mengikuti Kelompok Bermain

Pendidikan anak usia dini melalui jalur informal dapat dilakukan oleh keluarga dan lingkungan. Sebagai upaya pemberdayaan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pemerintah menggulirkan program Bina Keluarga Balita (BKB). BKB merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orangtua dan anggota keluarga lainnya tentang bagaimana melakukan pembinaan tumbuh kembang anak balita secara optimal, serta pemantauannya. BKB juga merupakan wahana bagi orang tua dan anggota keluarganya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan dan pendidikan anak-anaknya.

Tabel 4.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Pernah/Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2018

Jenis pendidikan Pra sekolah	Tipe daerah		
	Perkotaan	perdesaan	Perkotaan +Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Taman Kanak-kanak	59,08	63,16	61,99
BA/RA	23,87	11,92	15,35
PAUD Terintegrasi BKB/Taman Posyandu dll	17,05	23,98	21,99
Kelompok Bermain	0,00	0,94	0,67
Taman Penitipan anak	0,00	0,00	0,00
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 2018

4.2 Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat Sasaran langsung dari BKB adalah orangtua/keluarga yang mempunyai balita. serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu usaha peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM), walaupun usaha peningkatan mutu SDM tidak hanya dilakukan melalui pendidikan khususnya pendidikan formal (sekolah). Tetapi sampai detik ini, pendidikan masih dipandang sebagai sarana dan wahana utama untuk meningkatkan mutu SDM yang dilakukan secara sistematis dan berjenjang.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai dengan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan adalah program pendidikan gratis pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia sehingga tidak ada hambatan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tersebut.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah.

Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Masih sekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA)

yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 5,74 persen, penduduk yang masih sekolah sebesar 21,05 persen dan penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi sebesar 73,21 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak menikmati pendidikan.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk usia 5 Tahun Ke Atas menurut Tipe Daerah dan Partisipasi Sekolah, 2018

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Partisipasi Sekolah			Total
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Laki-laki	3,95	23,87	72,18	100,00
Perempuan	4,31	21,71	73,98	100,00
Laki-laki+Perempuan	4,12	22,81	73,07	100,00
Perdesaan				
Laki-laki	6,63	20,05	73,32	100,00
Perempuan	6,12	20,67	73,21	100,00
Laki-laki+Perempuan	6,38	20,36	73,26	100,00
Perkotaan +Perdesaan				
Laki-laki	5,87	21,14	72,99	100,00
Perempuan	5,61	20,97	73,42	100,00
Laki-laki+Perempuan	5,74	21,05	73,21	100,00

Sumber: Susenas 2018

Menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah di perdesaan (6,38 persen) lebih tinggi daripada penduduk perkotaan (4,12 persen). Hal ini disebabkan akses pendidikan penduduk perkotaan jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk perdesaan, Dan ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah perkotaan lebih lengkap dan lebih memadai dibandingkan daerah perdesaan.

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di daerah perkotaan (22,81 persen) relatif lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (20,36 persen). Sedangkan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi di perdesaan (73,26 persen) lebih tinggi daripada perkotaan (73,07 persen).

Faktor demografis lain yang berpengaruh terhadap akses masyarakat pada pendidikan adalah umur. Semakin tinggi kelompok usia sekolah semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) sebesar 99,23 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 94,06 persen, kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SM/MA) sebesar 57,04 persen, dan kelompok umur 19-24 tahun (kelompok usia PT) sebesar 9,01 persen.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah dan Partisipasi Sekolah, 2018

Tipe Daerah/Kelompok Umur	Partisipasi Sekolah			Total
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
7-12 th	0,00	100,00	0,00	100,00
13-15 th	0,77	91,85	7,38	100,00
16-18 th	0,00	69,97	30,03	100,00
19-24 th	0,00	19,28	80,72	100,00
Perdesaan				
7-12 th	0,00	98,90	1,10	100,00
13-15 th	0,00	94,75	5,25	100,00
16-18 th	0,00	51,32	48,68	100,00
19-24 th	0,00	4,77	95,23	100,00
Perkotaan +Perdesaan				
7-12 th	0,00	99,23	0,77	100,00
13-15 th	0,18	94,06	5,76	100,00
16-18 th	0,00	57,04	42,96	100,00
19-24 th	0,00	9,01	90,99	100,00

Sumber: Susenas 2018

Tabel 4.3 juga menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah pada kelompok usia jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Sebanyak 0,18 persen penduduk usia 13-15 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah, dimana sebanyak 0,77 persen berada di daerah perkotaan. Dan sebanyak 0,77 persen penduduk usia 7-12 tahun tidak bersekolah lagi, dimana sebanyak 1,10 persen berada di daerah pedesaan.

4.3 Angka Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu atau yang lebih APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan, misalnya pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung disetiap jenjang sekolah. Naiknya jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

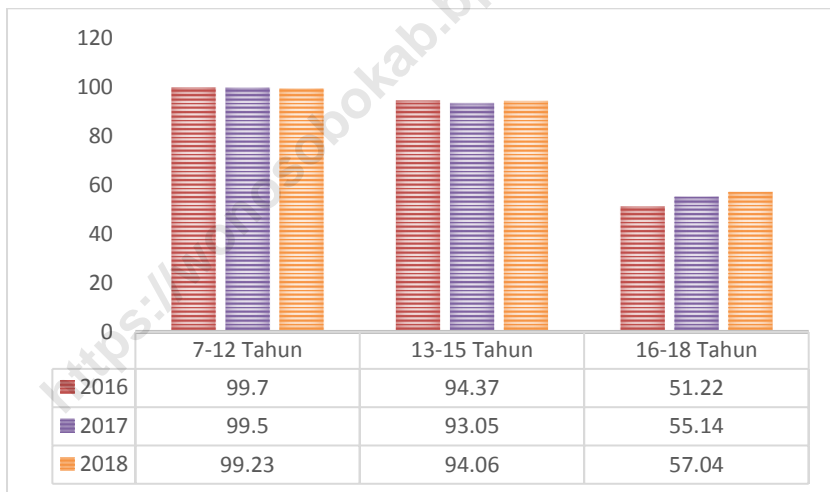
$$APS_{7-12} = \frac{\text{jumlah Penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun}} \times 100 \%$$

Catatan:

- APS usia 7-12 tahun;
- APS usia 16-18 tahun;
- APS usia 13-15 tahun;
- APS usia 19-24 tahun.

Gambar 4.3 memperlihatkan perkembangan APS menurut kelompok umur pada tahun 2016- 2018. Secara umum, partisipasi sekolah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada setiap kelompok umur. APS penduduk usia 7-12 tahun pada tahun 2016 sebesar 99,7 persen, menurun menjadi 99,5 persen pada tahun 2017 dan tetap berkisar di 99,5 persen pada tahun 2018. Sementara pada kelompok umur 13-15 tahun mengalami fluktuasi, APS pada tahun 2016 sebesar 94,37 persen menurun menjadi 93,05 persen pada tahun 2017 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 94,06 persen. Peningkatan APS terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun, dari 51,22 persen pada tahun 2016 menjadi 55,14 persen pada tahun 2017 dan menjadi 57,04 persen pada tahun 2018.

Gambar 4.3 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur, 2016, 2017 dan 2018



Sumber: Susenas 2016-2018

Tabel 4.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Tipe daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2018

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Kelompok Umur			
	7-12	13-15	16-18	19-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Laki-laki	100,00	96,41	76,43	17,74
Perempuan	100,00	88,72	59,14	20,89
Laki-laki+Perempuan	100,00	91,85	69,97	19,28
Perdesaan				
Laki-laki	100,00	90,19	65,73	4,14
Perempuan	98,05	100,00	35,52	5,48
Laki-laki+Perempuan	98,90	94,75	51,32	4,77
Perkotaan +Perdesaan				
Laki-laki	100,00	91,39	69,43	8,01
Perempuan	98,55	96,78	41,59	10,13
Laki-laki+Perempuan	99,23	94,06	57,04	9,01

Sumber: Susenas 2018

APS di perkotaan untuk jenjang SD, SMP, SM, dan PT cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, baik bagi penduduk laki-laki dan perempuan. Kecuali untuk APS SMP pada perempuan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan APS SMP perempuan di perkotaan. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penduduk perkotaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Terutama kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi, dimana nilai APS pendidikan pada kelompok umur 19-24 tahun di perkotaan (19,28 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan APS kelompok umur 19-24 tahun di perdesaan (4,77 persen). Hal ini disebabkan oleh tersedianya fasilitas pendidikan tinggi di perkotaan yang jauh lebih baik daripada di daerah perdesaan.

4.4 Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang

pendidikannya. APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas.

$$\text{APK SD} = \frac{\text{jumlah Murid Sd/ sederajat}}{\text{jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun}} \times 100 \%$$

Catatan:

- APK SD usia 7-12 tahun;
- APK SMP usia 13-15 tahun;-
- APK SM usia 16-18 tahun;
- APK PT usia 19-24 tahun

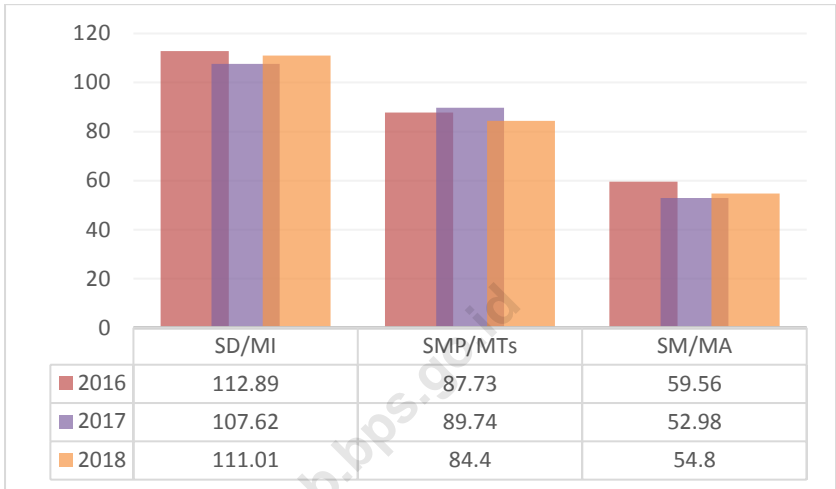
Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Perkembangan APK berbeda-beda untuk setiap jenjang pendidikan. Gambar 4.4 memperlihatkan peningkatan APK pada jenjang sekolah dasar dan menengah dari tahun 2016 hingga 2018. APK SD/MI mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 APK SD/MI sebesar 112,89 persen, menurun sebesar 107,62 persen pada tahun 2017 dan menjadi 111,01 persen pada tahun 2018.

Demikian pula untuk APK pada jenjang SMP/MTs juga mengalami fluktuasi. APK SMP/MTs pada tahun 2016 tercatat sebesar 87,73 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 89,74 persen kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 84,4 persen.

Sementara APK SMA/SMK/MA pada tahun 2016 sebesar 59,56 persen turun menjadi 52,98 persen pada tahun 2017 kemudian meningkat di tahun 2018 sebesar 54,80 persen.

Gambar 4.4 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2016, 2017, dan 2018



Sumber: Susenas 2016-2018

Tabel 4.5 menyajikan APK menurut tipe daerah, jenis kelamin dan jenjang pendidikan pada tahun 2018. Tabel ini juga mencatat bahwa APK untuk SD sebagian besar, baik laki-laki maupun perempuan, daerah perkotaan maupun perdesaan, nilainya lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa murid SD selain mencakup anak yang berusia 7-12 tahun juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan juga lebih dari 12 tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa banyak anak yang terlambat masuk SD atau sebaliknya sangat dini (belum cukup umur) untuk bersekolah SD, atau masih ada murid SD yang tinggal kelas.

Pendidikan kesetaraan berkontribusi dalam memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK menurut jenis kelamin relatif tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, APK laki-laki (118,09 persen) lebih besar daripada APK perempuan (104,81 persen). Demikian pula pada jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C, APK laki-laki (60,59 persen) lebih tinggi dari APK perempuan (47,57 persen). Sementara pada jenjang yang lebih tinggi, APK perempuan lebih besar daripada laki-laki. APK SMP/MTs/Paket B perempuan sebesar 86,99 persen, laki-laki sebesar

81,87 persen dan APK DI-DIV/S1-S3 perempuan sebesar 12,98 persen, laki-laki sebesar 10,01 persen.

Tabel 4.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan, 2018

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs/ Paket B	SMA/SMK /MA/paket C	DI- DIV/S1- S3
Perkotaan				
Laki-laki	108,72	117,05	58,00	21,57
Perempuan	114,99	85,92	50,18	24,90
Laki-laki+Perempuan	111,60	98,60	55,08	23,19
Perdesaan				
Laki-laki	122,92	73,49	61,96	5,42
Perempuan	101,35	87,41	46,67	7,83
Laki-laki+Perempuan	110,77	79,96	54,67	6,54
Perkotaan +Perdesaan				
Laki-laki	118,09	81,87	60,59	10,01
Perempuan	104,81	86,99	47,57	12,98
Laki-laki+Perempuan	111,01	84,40	54,80	11,41

Sumber: Susenas 2018

APK di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan. Kesenjangan APK tersebut semakin besar seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Di daerah perkotaan, APK SM/MA sebesar 55,08 persen, dan APK PT sebesar 23,19 persen. Untuk daerah perdesaan, APK SM/MA sebesar 54,67 persen, dan APK PT sebesar 6,54 persen. Dengan kata lain, sistem pendidikan SD/MI baik di perkotaan maupun perdesaan sudah lebih tertib dalam mengatur batas usia penerimaan murid.

4.5 Angka Partisipasi Murni

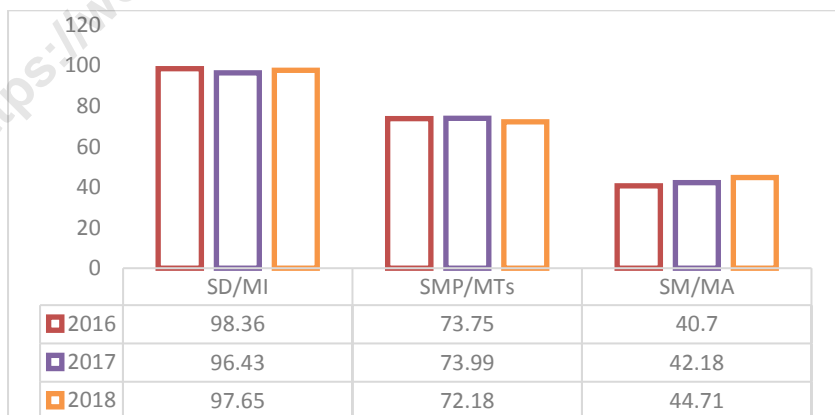
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang

sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Sebagai gambaran APM SD/MI adalah proporsi jumlah murid SD/MI yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Selama periode tahun 2016 hingga 2018, APM mengalami fluktuasi di jenjang pendidikan SD dan di jenjang pendidikan SMP, tapi mengalami peningkatan pada jenjang pendidikan SMA. APM jenjang pendidikan SM/MA pada tahun 2016 sebesar 40,70 persen, meningkat menjadi 42,18 persen pada tahun 2017 dan 44,71 persen pada tahun 2018. APM SD/MI tahun 2016 sebesar 98,36 persen, menurun menjadi 96,43 persen pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 97,65 persen di tahun 2018. Adapun pada jenjang SMP/MTs, APM menurun dari 74,07 persen pada tahun 2015 menjadi 73,75 persen pada tahun 2016, dan 73,99 persen di tahun 2018.

Gambar 4.5 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2016, 2017, dan 2018



Sumber: Susenas 2015-2018

Tabel 4.6 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan, 2018

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			
	SD/MI/ Paket A	SMP/MTs /Paket B	SMA/ SMK/M A/paket C	DI- DIV/S1- S3
Perkotaan				
Laki-laki	99,74	73,17	52,85	17,74
Perempuan	98,23	82,43	50,18	20,89
Laki-laki+Perempuan	99,05	78,66	51,85	19,28
Perdesaan				
Laki-laki	100,00	64,89	52,84	4,14
Perempuan	94,79	76,23	29,15	3,91
Laki-laki+Perempuan	97,07	70,16	41,55	4,04
Perkotaan +Perdesaan				
Laki-laki	99,91	66,48	52,85	8,01
Perempuan	95,66	78,00	34,56	9,03
Laki-laki+Perempuan	97,65	72,18	44,71	8,49

Sumber: Susenas 2018

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 secara umum nilai APM untuk semua jenjang pendidikan kurang dari 100 persen, kecuali APM penduduk laki-laki di daerah perdesaan. APM pendidikan cenderung semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan.

APM pada jenjang SD/MI sebesar 97,65 persen, sedangkan pada jenjang di atasnya jauh lebih rendah. Secara berturut-turut APM SMP/MTs sebesar 72,18 persen, APM SM/MA sebesar 44,71 persen, dan APM PT sebesar 8,49 persen.

Dilihat berdasarkan tipe daerah, secara umum APM di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan.

Di daerah perkotaan, APM SMP/MTs sebesar 78,66 persen, APM SM/MA sebesar 51,85 persen dan APM PT sebesar 19,28 persen. Untuk daerah perdesaan, APM SMP/MTs sebesar 70,16 persen, APM SM/MA sebesar 41,55 persen dan APM PT sebesar 4,04 persen. Sementara itu pada

jenjang SD/MI, APM daerah perkotaan (99,05 persen) sedikit lebih tinggi daripada daerah perdesaan (97,07 persen).

Sama halnya dengan pola yang terjadi pada APK, kesenjangan APM antara perkotaan dan perdesaan semakin terlihat pada jenjang PT. Fasilitas perguruan tinggi yang lebih lengkap menyebabkan APM PT di perkotaan (19,28 persen) jauh lebih tinggi daripada perdesaan (4,04 persen). Sementara pada jenjang pendidikan SD/MI, APM tidak memperlihatkan perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan jenis kelamin, ada perbedaan yang signifikan antara APM laki-laki dengan APM perempuan. APM perempuan lebih rendah daripada APM laki-laki, terutama pada jenjang SD/MI/Paket A dan jenjang SMA/SMK/MA/Paket C. Sementara itu untuk jenjang SMP/MTS/Paket B dan perguruan tinggi, APM laki-laki lebih rendah dari perempuan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesenjangan gender bukan menjadi masalah dalam pembangunan bidang pendidikan di Indonesia khususnya di Kabupaten Wonosobo.

BAB 5

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pendidikan bermutu dalam pembangunan sebuah bangsa (termasuk di dalamnya pembangunan pada lingkup kabupaten/kota) dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing. Tanpa pendidikan yang bermutu tidak mungkin tujuan pembangunan sebuah bangsa dapat terwujud dengan baik. Pendidikan bermutu dan pembangunan berkualitas bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam konteks bangsa Indonesia, landasan yuridis Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyatakan bahwa "...kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...". Merujuk kepada petikan pembukaan UUD 1945 tersebut, jelas bahwa salah satu tujuan pembangunan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui upaya pembangunan sector pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan pilar strategis yang tidak bisa tergantikan oleh sektor manapun dan sudah menjadi komitmen nasional sejak negara ini berdiri, sehingga isu pendidikan memiliki kedudukan yang strategis untuk selalu dikaji dan dikembangkan.

Untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan alasan tidak/belum pernah sekolah/tidak sekolah lagi.

5.1 Angka Melek Huruf

Melek aksara (juga disebut dengan melek huruf) adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang

tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Angka melek aksara merupakan tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih mudah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

$$\text{AMH} = \frac{\text{Jml pddk umur 15 thn ke atas bisa membaca dan menulis}}{\text{Jumlah penduduk umur 15 thn ke atas}} \times 100$$

Catatan:

- AMH 15 tahun ke atas;
- AMH 15-24 tahun;
- AMH 15-45 tahun;
- AMH 45 tahun ke atas

Di dunia internasional salah satu aspek penentu tingkat pembangunan suatu bangsa diukur dari tingkat keaksaraan penduduknya. Angka melek huruf merupakan salah satu variabel dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

Pemberantasan buta aksara tidak dapat langsung dilaksanakan. Namun memerlukan waktu dan perancangan program yang tepat. Dalam pengembangan masyarakat, program biasanya dikembangkan untuk menyediakan pelayanan sosial yang secara langsung menyentuh sasaran perubahan.

Berbagai program yang telah dilaksanakan dalam pemberantasan buta aksara diantaranya adalah kursus A-B-C, Program Pemberantasan Buta Huruf Fungsional, Kejar Paket A, dan program Keaksaraan Fungsional (KF) yang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 1995.

Kondisi keaksaraan di Kabupaten Wonosobo ditunjukkan pada Tabel 5.1 yang menyajikan persentase penduduk melek huruf yang berusia 15 tahun ke atas menurut tipe daerah, jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan hasil Susenas 2018. Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 94,20 persen, rendahnya angka melek huruf pada kelompok umur 15 tahun ke atas ini dipengaruhi oleh kelompok umur 45 tahun ke atas. Persentase penduduk 45 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 86,87 persen.

Tabel 5.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2018

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Jenjang			
	15 Tahun ke atas	15-24 Tahun	25-44 Tahun	45 Tahun ke Atas
Perkotaan				
Laki-laki	96.67	100.00	99.60	92.83
Perempuan	93.51	100.00	99.24	85.91
Laki-laki+Perempuan	95.10	100.00	99.42	89.36
Perdesaan				
Laki-laki	95.42	100.00	99.79	89.28
Perempuan	92.22	100.00	99.38	82.49
Laki-laki+Perempuan	93.84	100.00	99.58	85.88
Perkotaan +Perdesaan				
Laki-laki	95.78	100.00	99.14	90.29
Perempuan	92.58	100.00	98.91	83.46
Laki-laki+Perempuan	94.20	100.00	99.02	86.87

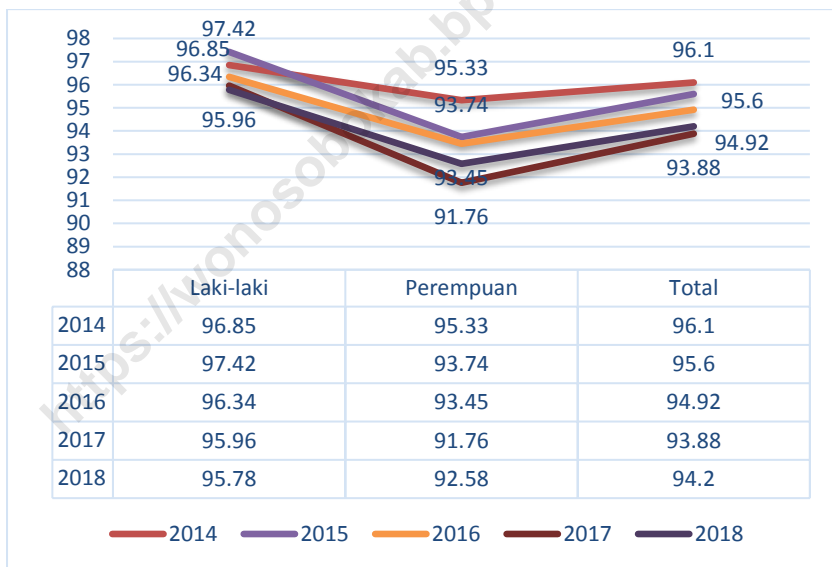
Sumber: Susenas 2018

Dilihat menurut tipe daerah, persentase penduduk melek huruf umur 15 tahun ke atas di daerah perdesaan sebesar 93,84 persen, lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan sebesar 95,10 persen. Kondisi yang sama terjadi pada kelompok umur 45 tahun ke atas. Sedangkan untuk kelompok umur 25-44 tahun daerah perdesaan lebih tinggi dari daerah perkotaan. Sementara itu untuk kelompok umur 15-24 tahun kondisi sama antar daerah perkotaan dan perdesaan yaitu 100,00 persen. Hal ini disebabkan di daerah perkotaan dan perdesaan sudah tersedia fasilitas pendidikan.

Persentase penduduk perempuan melek huruf umur 15 tahun ke atas sebesar 92,58 persen, lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki sebesar 95,78 persen. Kondisi yang sama terjadi pada kelompok umur 45 tahun ke atas. Sedangkan untuk kelompok umur 25-44 tahun daerah perdesaan lebih tinggi dari daerah perkotaan. Sementara itu untuk kelompok umur 15-24 tahun kondisi sama antar daerah perkotaan dan perdesaan yaitu 100,00 persen.

Hasil Susenas 2018 menunjukkan bahwa angka melek huruf umur 15 tahun ke atas mencapai 94,20 persen. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka melek huruf mengalami kenaikan (Gambar 5.1).

Gambar 5.1 Perkembangan Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Kelompok Umur, 2014-2018



Sumber: Susenas 2014-2018

Salah satu program pemerintah dalam penuntasan buta aksara adalah program keaksaraan fungsional (KF). Program KF merupakan program terpadu yang terdiri dari membaca, menulis, berhitung, dan keterampilan.

Salah satu target SDGs adalah menjamin pada 2018 semua anak dimanapun, laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar. Salah satu indikator yang digunakan untuk memantau pencapaian tersebut adalah angka melek huruf penduduk 15-24 tahun. Jika dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, angka melek huruf kelompok umur 15-24 tahun cenderung lebih tinggi. Angka melek huruf umur 15-24 tahun pada tahun 2018 mencapai 100,00 persen.

5.2 Rata-rata Lama Sekolah

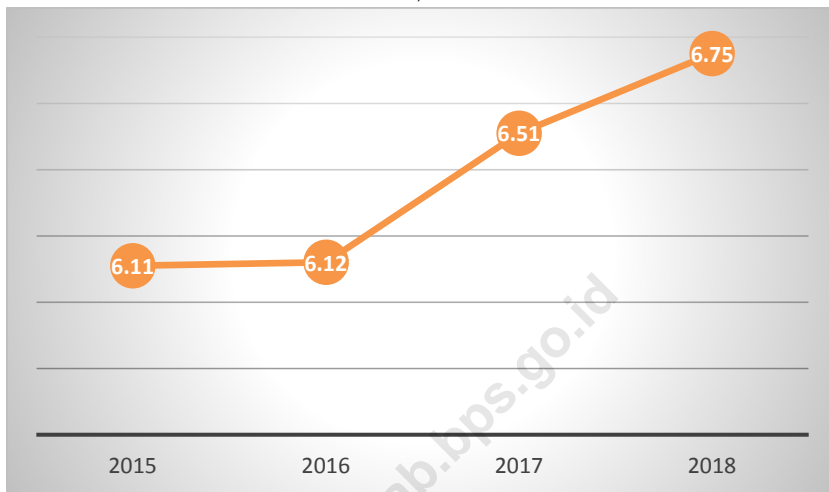
Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen pembentuk indikator IPM ada 4 yaitu: Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah serta Pengeluaran per Kapita.

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan.

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas pada tahun 2018 mencapai 6,75 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendidikan penduduk umur 25 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 1 SMP (kelas VII) atau putus sekolah di kelas 1 SMP (Kelas VII).

Gambar 5.2 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas, 2015 – 2018



Sumber: Susenas 2015-2018

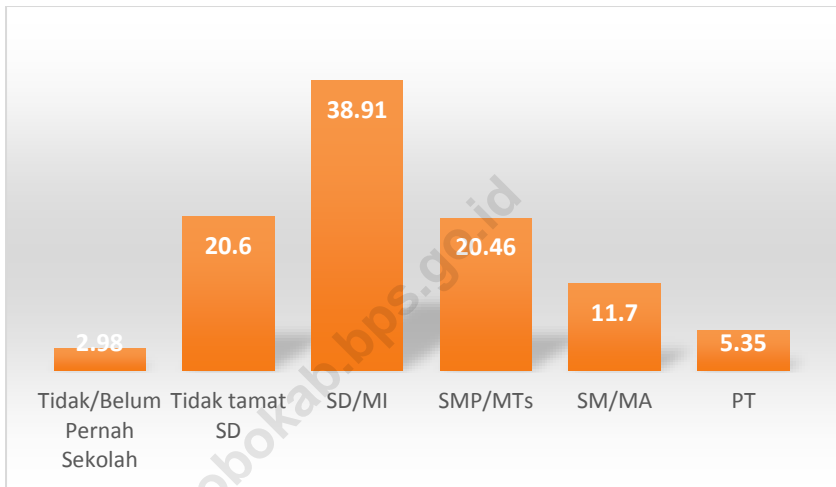
Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebesar 6,11 tahun meningkat menjadi sebesar 6,12 tahun pada tahun 2016, 6,51 tahun pada tahun 2017 dan meningkat lagi menjadi sebesar 6,75 tahun pada tahun 2018. Kondisi ini menggambarkan bahwa kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan mengalami peningkatan. Jika rata-rata lama sekolah dapat terus ditingkatkan, diharapkan sasaran pembangunan pendidikan dapat tercapai.

5.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara (daerah) karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Hampir semua negara berkembang

menghadapi masalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diakibatkan oleh rendahnya mutu pendidikan.

Gambar 5.3 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018

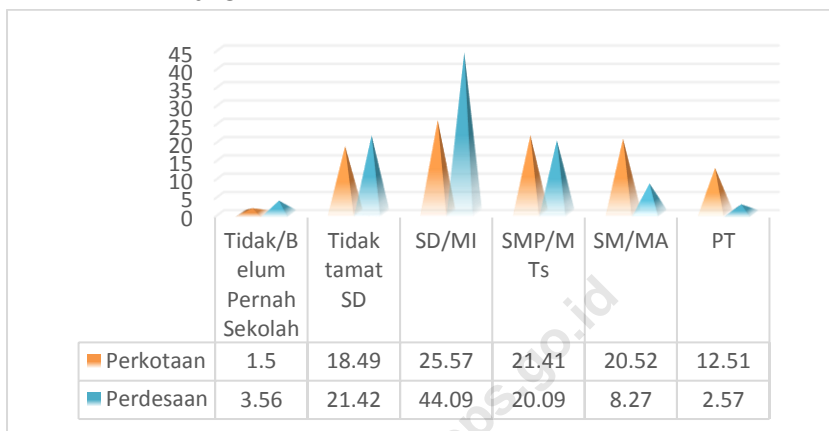


Sumber: Susenas 2018

Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga selain bisa memperoleh pekerjaan yang layak dengan gaji/upah yang sesuai, tingginya tingkat pendidikan juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat.

Gambaran kualitas SDM Indonesia dilihat dari pendidikan yang ditamatkan disajikan pada Gambar 5.3. Dari gambar tersebut terlihat bahwa persentase tertinggi adalah penduduk yang tamat SD/MI sebesar 38,91 persen, diikuti Tidak Tamat SD sebesar 20,6 persen, dan tamat SMP/MTs sebesar 20,46 persen. Sedangkan persentase penduduk yang tamat SM/MA sebesar 11,7 persen dan tamat PT sebesar 5,35 persen. Disamping itu masih terdapat sebesar 2,98 persen penduduk 15 tahun ke atas yang belum pernah mengenyam pendidikan.

Gambar 5.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018



Sumber: Susenas 2018

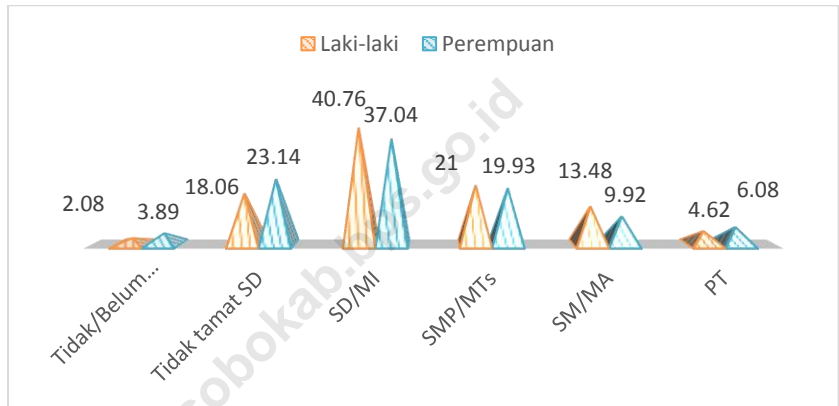
Tingkat pendidikan penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan penduduk perdesaan. Persentase penduduk di perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan SMP/MTs ke atas (SMP/MTs, SM/MA, dan PT) sebesar 54,44 persen, hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan perdesaan sebesar 30,93 persen. Sedangkan persentase penduduk yang belum mengenyam pendidikan di perdesaan (3,56 persen) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (1,5 persen).

Secara umum, tingkat Pendidikan penduduk laki-laki lebih baik daripada perempuan. Persentase laki-laki yang menamatkan pendidikan, lebih tinggi dibanding perempuan. Penduduk perempuan lebih banyak yang tidak menamatkan SD/MI dan belum pernah sekolah. Yang menarik, pada jenjang perguruan tinggi, persentase perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Kesetaraan gender pada bidang Pendidikan sudah cukup baik, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam menempuh Pendidikan tinggi.

Persentase perempuan yang belum pernah mengenyam pendidikan sebesar 3,89 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 2,08 persen. Yang pernah sekolah tapi tidak menamatkan SD/MI, perempuan

lebih tinggi 5,08 point dibanding laki-laki. Sementara itu, laki-laki lebih unggul dibanding perempuan dalam menamatkan pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA.

Gambar 5.5 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2018



Sumber: Susenas 2018



LAMPIRAN

STATISTIK PENDIDIKAN

Kabupaten Wonosobo 2018

Lampiran 1. Persentase Penduduk menurut Tipe daerah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Wonosobo (ribuan), 2018

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	50,73	49,27	100,00
Perdesaan	50,71	49,29	100,00
Perkotaan+Perdesaan	50,72	49,28	100,00

Lampiran 2. Presentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah di Kabupaten Wonosobo (ribuan), 2018

Kelompok Umur	Tipe daerah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan +Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
0-2	5.10	5.10	5.10
3-4	3.10	3.12	3.11
5-6	3.57	3.72	3.68
7-12	10.75	10.26	10.40
13-15	4.24	5.38	5.06
16-18	5.02	4.52	4.66
19-24	8.62	8.29	8.38
25-44	27.90	27.90	27.90
45+	31.70	31.71	31.71
Total	100.00	100.00	100.00



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

<https://wonosobokab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN WONOSOBO**

Jl. Mayjend Bambang Sugeng KM 2,2
Wonosobo
Telp. 0286-324270 Fax. 0286-3325380
e-mail: bps3307@bps.go.id
<https://wonosobokab.bps.go.id>